

# **PENGARUH PENERIMAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI PAPUA**

**M. Aldrin Akbar, SE.,MM  
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua**

## **ABSTRAK**

*Makin meningkatnya persaingan diberbagai sektor di Indonesia sejalan dengan semakin meningkatkan profitabilitas dan likuiditasnya dalam membantu pertumbuhan perekonomian bangsa pada umumnya dan Provinsi Papua khususnya. Berbicara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memang sungguh menarik. Kasus tidak tercapainya target PAD ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten atau Provinsi, tapi juga di beberapa Kabupaten atau Provinsi di Indonesia.*

*Penilaian, akan diketahui Nilai Wajar dari masing-masing asset, baik asset operasional dan non operasional (asset berlebih), kemudian juga terungkap mengenai kelengkapan legalitas, kondisi Asset, hingga status yang menempati (yang menggunakan) dari masing-masing asset tersebut. Mungkin orang awam berpikir bahwa Pemda tahu benar siapa-siapa pengguna asset Negara/Pemda, padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak asset yang telah berpindah tangan/berubah kepemilikan karena tidak adanya pengelolaan asset yang benar dan bahkan banyak asset yang memiliki legalitas kepemilikan ganda atau berstatus quo. Proyek Study Optimalisasi asset ini satu persatu kendala diatas dapat diatasi, tinggal bagaimana terwujudnya birokrasi yang baik untuk perijinan serta keamanan yang terjamin sehingga mendukung setiap penyelenggaraan kegiatan investasi.*

*Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pemakaian kekayaan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Papua.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan studi korelasional yaitu mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain.*

*Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Nilai R square 0,342 yang mengindikasikan bahwa variabel independen tersebut hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 34,2%. Sedangkan sisanya sebesar 65,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.*

*Keyword: Pemakaian kekayaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah*

## PENDAHULUAN

Makin meningkatnya persaingan diberbagai sektor di Indonesia sejalan dengan semakin meningkatkan profitabilitas dan likuiditasnya dalam membantu pertumbuhan perekonomian bangsa pada umumnya dan Provinsi Papua khususnya. Berbicara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memang sungguh menarik. Kasus tidak tercapainya target PAD ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten atau Provinsi, tapi juga di beberapa Kabupaten atau Provinsi di Indonesia. Alasannya cukup beragam, tapi dari semua alasan yang disebutkan, satu yang tidak pernah absen yakni kesalahan penetapan Target Pajak/Retribusi. Kita ketahui bersama bahwa dampak dari tidak tercapainya target PAD pada tahun berjalan akan menghambat pembangunan pada periode yang akan datang. Walaupun biasanya pemerintah pusat akan menutupi kekurangannya dengan Dana Perimbangan, serta tambahan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SILPA), itupun jika ada dan mencukupi, namun apabila tidak, maka program yang telah direncanakan akan ditinjau kembali, bahkan tidak jarang dibatalkan pelaksanaannya demi memotong pengeluaran pemerintah pada tahun berikutnya.

Sumber pendapatan lain yang dapat dimaksimalkan seperti PBB misalnya, hal yang bias dilakukan untuk peningkatan dari PBB adalah motivasi kepada dua pihak yaitu Wajib Pajak dan Pemungut Pajak berupa *punishment* dan *reward*. Bentuknya bias seperti kompensasi berupa pengembalian uang dalam persentase/bersaran tertentu bagi Wajib Pajak yang telah membayar pajak sebelum jatuh tempo, sedangkan bagi Pemungutan pajak yang mencapai target atau yang melebihi target yang telah ditetapkan agar diberikan bonus (semacam *Fee* resmi), ini akan membuat

keduanya semangat untuk membayar dan memungut Pajak. Sedangkan untuk ekstensifikasi sumber-sumber pajak yang lain adalah dengan mengetahui asset apa saja yang dimiliki, karena sebagian besar yang terjadi pada pemda-pemda di Indonesia, baik Pemerintah baik Pusat dan Daerah tidak mengetahui secara keseluruhan asset-asset yang dimilikinya. Maka sebaiknya sesegera mungkin Pemda mulai dengan menginventarisasi dan mengelompokkan seluruh asset-asset yang ada, dan kemudian dilanjutkan dengan Penilaian dan Pengelolaan Asset dengan menerapkan manajemen asset yang terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan/manajemen asset daerah ini memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat memetakan dengan jelas sumber-sumber PAD, mencegah Korupsi, mencegah Pemborosan Anggaran dan merupakan usaha Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) menjadi lebih baik. Dari hasil pekerjaan pertama, yaitu Penilaian, akan diketahui Nilai Wajar dari masing-masing asset, baik asset operasional dan non operasional (asset berlebih), kemudian juga terungkap mengenai kelengkapan legalitas, kondisi Asset, hingga status yang menempati (yang menggunakan) dari masing-masing asset tersebut. Mungkin orang awam berpikir bahwa Pemda tahu benar siapa-siapa pengguna asset Negara/Pemda, padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak asset yang telah berpindah tangan/berubah kepemilikan karena tidak adanya pengelolaan asset yang benar dan bahkan banyak asset yang memiliki legalitas kepemilikan ganda atau berstatus quo. Tentu ini merupakan suatu masalah besar yang harus dibenahi. Selama ini yang sering menjadi kendala umum dan selalu dikeluhkan oleh para investor dalam merencanakan Investasi disuatu daerah termasuk Provinsi Papua adalah kurangnya informasi Potensi Sumber Daya Alam yang jelas dan rinci

yang dikeluarkan oleh Pemda, Buruknya Infrastruktur, Perijinan yang rumit karena tumpang tindihnya peraturan dan kewenangan, banyaknya pungli serta kondisi keamanan setempat. Maka dengan dilakukannya Proyek Study Optimalisasi asset ini satu persatu kendala diatas dapat diatasi, tinggal bagaimana terwujudnya birokrasi yang baik untuk perijinan serta keamanan yang terjamin sehingga mendukung setiap penyelenggaraan kegiatan investasi.

Setelah Proyek Optimalisasi Asset Daerah yang didalamnya mencakup Penilaian Asset Daerah dan Study Optimalisasi Asset Daerah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah Pengawasan dan Pengendalian dari setiap Kegiatan Manajemen Asset yang sedang dilakukan, dan terakhir dilakukan Evaluasi dari semua hasil-hasil kegiatan yang dicapai sebelumnya untuk menentukan kebijakan yang akan datang. Pada prinsipnya Proyek Study Optimalisasi Asset Daerah ini dilakukan hanya sekali dalam periode tertentu, karena sifatnya lebih kepada membuat Master Plan dan memerikan rekomendasi teknis. Sehingga pengawan dan pengendalian sangat diperlukan untuk mengawal jalannya program-program tersebut. Sedangkan Penilaian Asset Daerah, merupakan kegiatan Berkala, dalam rancangan Undang-undang Penilaian yang masih digodok legislatif, Penilaian Asset dilakukan sedikitnya 3 tahun sekali.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. Optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Optimalisasi adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk

menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996:705).

Asset adalah suatu fasilitas fisik tangible dan non intangible yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan sesuai fungsi dari asset yang bersangkutan. Menurut Guritno (1993;17), asset adalah segala sesuatu yang bernilai, bisa milik perorangan atau organisasi. Jadi asset adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dipertukarkan yang dimiliki oleh perorangan ataupun organisasi.

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), langkah ini terdiri atas upaya mempelajari optimalisasi PAD dan pengembangan sistem pelayanan satu atap.

- a) Optimalisasi asset pemerintah daerah, langkah ini terdiri atas upaya mempelajari optimalisasi asset pemerintah daerah melalui pengembangan database asset pemerintah daerah yang potensial kepada investor.
- b) Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus mengelola daerah dengan baik dan mandiri sehingga mampu menjadi wirausahawan atas daerahnya.
- c) Penilaian harta kekayaan daerah. Langkah ini melakukan penilaian atas semua asset pemerintah daerah dan memberikan penilaian atas potensi ekonomi wilayah.
- d) Pengembangan strategi pemasaran kota pemerintah daerah dituntut mampu memasarkan kota kepada berbagai pihak, terutama investor di berbagai sektor ekonomi.

Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007) dalam Nurul (2008) antara lain:

- a. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana

tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.

- b. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
- c. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Pendapatan Asli Daerah pada era otonomisasi di provinsi Papua sekarang ini, menitikberatkan pada kemandirian daerah. Otonomi Daerah juga dituntut daerah untuk lebih mampu dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri termasuk dalam pembiayaannya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian

kuantitatif dengan studi korelasional yaitu mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain.

Penelitian dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Papua. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Juni sampai September 2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Papua. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik sampel jenuh yaitu populasi sekaligus menjadi sampel. Dalam hal ini sample yang ambil adalah kekayaan daerah yang ada di Provinsi Papua selama kurun waktu 2007 – 2011.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pemakaian kekayaan daerah dan variabel pendapatan asli daerah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linear sederhana yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antar dua variable yaitu variabel independen (bebas) pemakaian kekayaan daerah terhadap variabel dependen (terikat) pendapatan asli daerah.

Adapun perhitungan persamaan regresi linier sederhana ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Dimana :

Y = Variabel dependen (terikat) yakni Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta dari persamaan regresi.

$b_1$  = Koefisien regresi dari variabel independen

$X_1$  = Variabel independen pemakaian kekayaan daerah

Untuk memudahkan dalam pengolahan data tersebut maka sebagai alat analisis yang digunakan dalam mengolah data adalah program SPSS versi 17. Untuk menguji hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian secara parsial. Pengujian secara parsial digunakan uji statistik t (t-test)..

Uji parsial digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis statistik yang diajukan adalah :

H0 :  $b_i = 0$  : tidak ada pengaruh signifikan

H1 :  $b_i \neq 0$  : ada pengaruh signifikan

Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah:

- a. H1 diterima apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$  dan nilai probabilitas  $<$  level of significant sebesar 0,05,
- b. H0 diterima apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$  dan nilai probabilitas  $>$  level of significant sebesar 0,05.

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ).

Nilai R<sup>2</sup> yang mendekati satu berarti variabel-variabel terikat independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, dan apabila nilai R<sup>2</sup> semakin kecil mendekati nol, berarti variabel-variabel independen hampir tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif,

pengujian terhadap variabel-variabel penelitian secara Parsial (Uji statistik – t)

### 1. Statistik Deskriptif

**Tabel. 4.1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
Retribusi PKD	5	2792	3962	16434	3286.80	609.171
PAD	5	268238	380026	1738834	347766.80	45228.251
Valid N (listwise)	5					

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel (N) yang diambil sebanyak sebanyak 5 buah. Nilai terkecil penerimaan pemakaian kekayaan daerah selama tahun 2007 hingga tahun 2011 adalah sebesar Rp. 2.792.042.812, nilai tertinggi penerimaan pemakaian kekayaan daerah adalah sebesar Rp. 3.961.962.634 dan jumlah penerimaan pemakaian kekayaan daerah selama tahun 2007 hingga tahun 2011 sebesar Rp.

16.434.220.784 dengan rata-rata Rp. 3.286.844.157.

Sedangkan nilai terkecil pendapatan asli daerah selama tahun 2007 hingga tahun 2011 adalah sebesar Rp. 268.238.000.000,-, nilai tertinggi penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 380.026.000.000 dan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 2007 hingga tahun

2011 sebesar Rp. 1.738.834.000.000,- dengan rata-rata Rp. 347.760.000.000,-.

### 1. Analisa regresi linier sederhana

Berdasarkan hasil olah program SPSS diperoleh nilai koefisien regresi sebagai berikut :

**Tabel. 4.2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	204962.975	115807.152		1.770	.175
	Retribusi PKD	43.448	34.760	.585	1.250	.300

a. Dependent Variable: PAD

Dari uraian tersebut maka dengan demikian dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$PAD = 204.962,975 + 43,448 PKD$$

Model persamaan regresi sederhana tersebut bermakna :

a) Nilai konstanta sebesar 204.962,975 artinya apabila nilai variabel independen Pemakaian Kekayaan Daerah dianggap konstan atau tidak ada maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua bernilai sebesar 204.962,975.

b) Nilai  $b_1 = 43,448$  berarti setiap perubahan variabel Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar satu satuan, akan mengakibatkan perubahan positif pada nilai pendapatan asli daerah sebesar 43,448. Dengan demikian predictor Pemakaian Kekayaan Daerah yang bernilai positif tersebut mengakibatkan setiap tambahan satu satuan Pemakaian Kekayaan Daerah akan mempengaruhi bertambahnya nilai tingkat pendapatan asli daerah sebesar 43,448. Namun sebaliknya jika terjadi penurunan satu satuan predictor Pemakaian Kekayaan Daerah maka akan mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah sebesar sebesar 43,448.

### 2. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji statistik koefisien determinasi pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel. 4.3**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.585 <sup>a</sup>	.342	.123	42349.158	1.926

a. Predictors: (Constant), Retribusi PKD

b. Dependent Variable: PAD

Dari Tabel 4.5 tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,342. Hal ini menunjukkan bahwa 0,342 atau 34,2% variasi variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen pemakaian daerah, sedangkan sisanya sebesar 65,8% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan pada model penelitian ini.

**3. Uji t** disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (pemakaian kekayaan daerah) dalam menerangkan variabel dependen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa Variabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :  $t_{hitung} = 1,250$ ,  $t_{tabel} = 2,353$ , dengan tingkat probabilitas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan  $t_{hitung} = 1,250 < t_{tabel} = 2,353$  dan  $p = 0,300 > \alpha = 0,05$ . Maka secara parsial

Pemakaian Kekayaan Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh penerimaan pemakaian daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Papua adalah tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikansinya ditunjukkan dengan hasil nilai t hitung yang nilainya lebih kecil daripada nilai t tabel (nilai t hitung sebesar  $1,250 < \text{nilai t tabel } 2,353$ ), dengan tingkat signifikan  $0,300$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Ini berarti bahwa variabel pemakaian kekayaan daerah tidak begitu memberikan dampak yang berarti terhadap jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua sehingga pemakaian kekayaan daerah perlu dilakukan penataan ulang dan dioptimalisasi pendapatannya.

Nilai konstanta yang ditunjukkan pada hasil penelitian memberikan arti bahwa nilai pendapatan asli daerah provinsi Papua sebesar  $204.962,975$  walaupun penerimaan pemakaian kekayaan daerah tidak ada. Sedangkan bila ada perubahan satu satuan pada setiap koefisien nilai pemakaian kekayaan daerah sebesar  $43,442$ , maka akan mengakibatkan perubahan yang positif pada pendapatan asli daerah provinsi Papua sebesar  $43,442$ . Dengan demikian predictor pemakaian kekayaan daerah yang bernilai positif mengakibatkan setiap tambahan satu satuan pemakaian kekayaan daerah akan mempengaruhi bertambahnya nilai pendapatan asli daerah provinsi Papua sebesar  $43,442$ . Namun sebaliknya jika terjadi penurunan satu satuan predictor pemakaian kekayaan daerah berakibat berkurangnya nilai pendapatan asli daerah provinsi Papua sebesar  $43,442$ .

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi

Papua adalah sebesar  $0,342$ . Ini berarti pendapatan asli daerah provinsi Papua hanya dapat dijelaskan oleh variabel pemakaian kekayaan daerah sebesar  $34,2\%$  sedangkan sisanya sebesar  $65,8\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan uji hipotesis yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Secara parsial realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Nilai R square  $0,342$  yang mengindikasikan bahwa variabel independen tersebut hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar  $34,2\%$ . Sedangkan sisanya sebesar  $65,8\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4 : Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Ghozali, Imam, ArifinSabeni. 1997. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba4 : Jakarta.

- .Kaho, Joseph Riwu. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Safitri, Nurul Aisyiyah. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.
- Siregar, Doli. D. (2004), *Manajemen Aset*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Triwidodo, Pambudi. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.